



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA
2026**

KATA PENGANTAR

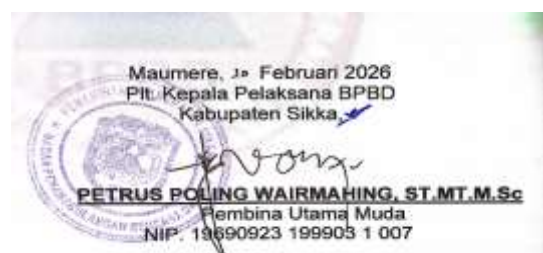
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntunanNya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan.

Sesuai dengan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) perangkat daerah merupakan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan laporan kepada Bupati yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Bupati kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bersama serta sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, kami mengucapkan limpah terima kasih.

Semoga Tuhan Memberkati....



Maumere, 18 Februari 2026
Pili Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Sikka
PETRUS POLING WAIRMAHING, ST.MT.M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19690923 199903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah..... 1

1.3 Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintah Yang Yang Berada di setiap Perangkat Daerah..... 12

1.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..... 15

1.5 Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemrintahan, Fungsi Pegawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemrintahan Yang Memeuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja..... 17

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 21

2.1 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025..... 21

2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... 29

BAB III PENERAPAN DAN PENCAPAIN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..... 32

3.1 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... 31

BAB IV PENUTUP..... 35

4.1 Kesimpulan..... 35

4.2 Saran..... 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	12
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	13
Tabel 1.3	Jenjang Pendidikan/Golongan ASN Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	13
Tabel 1.4	Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	14
Tabel 1.5	Jabatan Struktural dan Fungsional ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	15
Tabel 1.6	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025.....	15
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025.....	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	30
Tabel 3.1	Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bidang Ketentraman Dan Ketertiban.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	2
------------	--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Bupati selaku Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tugas pembantuan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan setiap tahun setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat 3 bulan dari berakhirnya tahun anggaran. Untuk mendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka selama Tahun Anggaran 2025, harus mampu melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada Bupati sebagai dasar bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah oleh Bupati. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dukungan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum khususnya penanggulangan bencana sebagai urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi salah satu Perangkat Daerah yang mengampuh penerapan Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penerapan Standar Pelayanan Minimal menggambarkan pemenuhan terhadap hak pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penanganan bencana. Laporan Penyelenggaraan menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dari Bupati kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

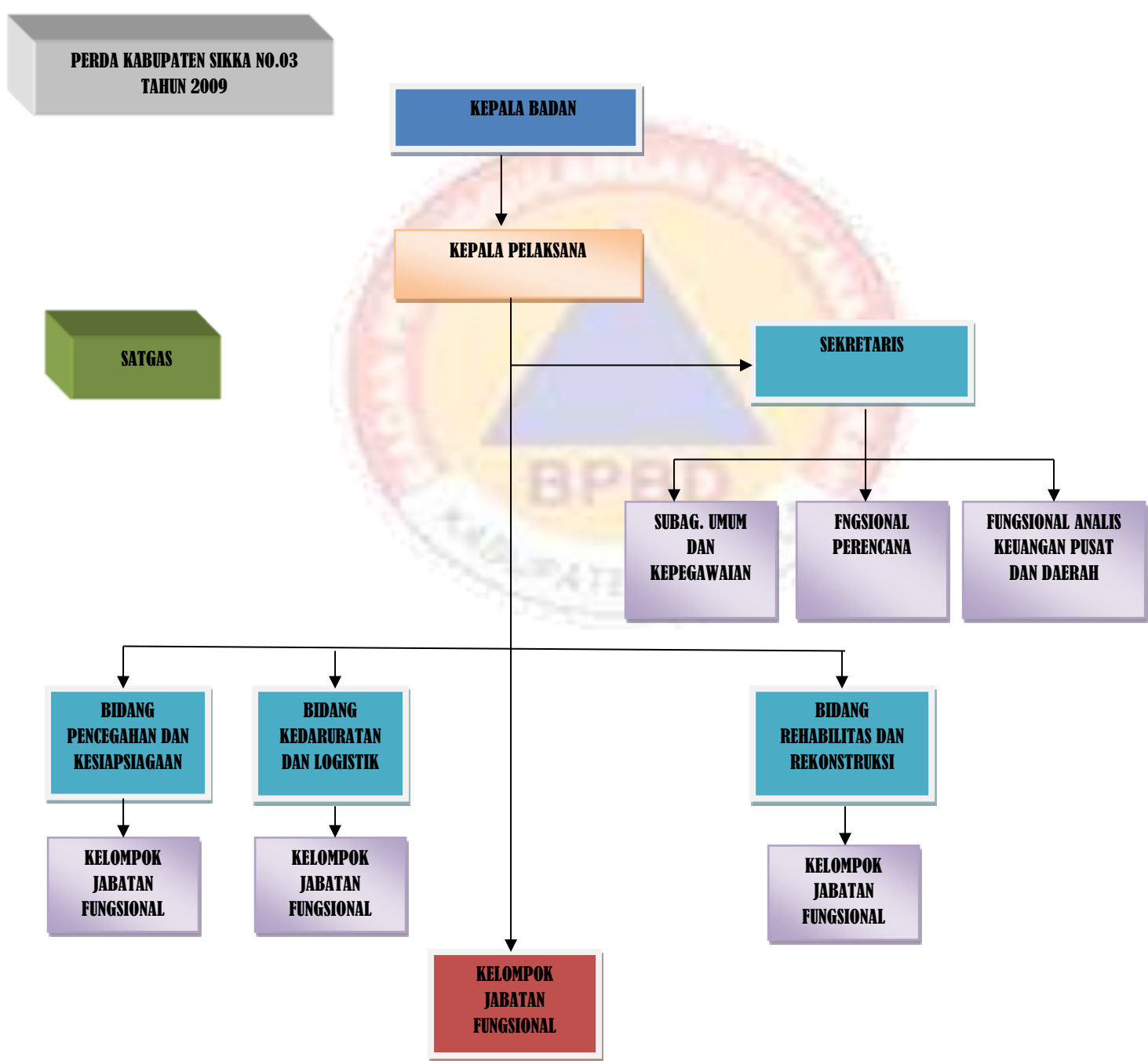
1.2. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah

untuk penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum daerah, Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka



Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur pelaksana bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sikka melalui Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Pembagian tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sebagai berikut:

a) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci uraian tugas pengarah badan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
2. Menganalisa dan pengembangan informasi peristiwa bencana daerah.
3. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.
4. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
5. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
6. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
7. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan bencana daerah
8. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
9. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

b) Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi pengordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana. Pada fungsi koordinasi unsur pelaksana melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan paskabencana. Untuk fungsi komando, unsur pelaksana

melaksanakan komando dalam mengorganisir sumber daya manusia, peralatan, logistik, yang ada pada perangkat daerah lain, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain serta langka-langka yang diperluhkan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan untuk fungsi pelaksana dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan. Unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut;

- a) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
- b) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;
- c) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- d) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- e) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- h) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana;
- i) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- j) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
- k) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;

- l) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- m) Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- d) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- f) Sekretariat terdiri dari:

2.a. Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Kesekretariatan serta pengajuan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Mengoordinasikan para Kepala Bidang dan Sub Bidang dalam penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;

- f) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h) Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

2.b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Umum, Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun program dan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Umum, dan Kepegawaian lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Umum dan Kepegawaian;
- d) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;
- f) Penyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- g) Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- h) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

2.c. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Pejabat Fungsional Perencana

Tugas Pejabat Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;
6. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
7. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
8. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

Pejabat fungsional perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, terdiri dari, perencana ahli pertama, perencana ahli muda dan dibantu oleh perencana (PPPK) dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Perencana Ahli Pertama,
 - a. mengidentifikasi permasalahan;
 - b. merumuskan permasalahan;
 - c. inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
 - d. inventarisasi dan identifikasi data primer;
 - e. mengolah data dan informasi;
 - f. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
 - g. menganalisis data dan informasi;
 - h. menyajikan data dan informasi;
 - i. melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
 - j. melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
 - k. mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
2. Perencana Ahli Muda
 - a. memformulasikan sajian untuk analisis;
 - b. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - c. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - d. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/ fungsional;
 - e. menguji alternatif kriteria dan model;
 - f. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 - g. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;

- h. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 - i. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - j. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - k. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
 - l. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- b. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- Tugas Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Keuangan dan Perlengkapan;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris.
 - f. Pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, saat ini masih lowong dan belum terisi sejak pejabat yang lama memasuki masa pensiun.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis pencegahan dan kesiapsiagaan yang mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional pada bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- d. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- h. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- i. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah unsur pelaksana teknis dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. Mengoordinasikan para pejabat fungsional pada bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para Pejabat Fungsional;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Penanggulangan bencana daerah. Jabatan Fungsional termasuk hasil penyetaraan dari jabatan struktural pengawas yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam bidang masing-masing dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun antar perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari:

a. Analis Kebencanaan

Fungsional analis kebencanaan adalah fungsional yang melaksanakan analisis penanggulangan bencana. Tugas Jabatan Fungsional Analis kebencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan dan pengembangan strategi kebencanaan.

Ruang lingkup kegiatan analisis kebencanaan pada setiap jenjang jabatan meliputi:

- 1) Analis Kebencanaan Ahli Pertama melaksanakan inventarisasi dan kebencanaan, identifikasi penyelenggaraan bahan analisis penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;

- 2) Analis Kebencanaan Ahli Muda melaksanakan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 3) Analis Kebencanaan Ahli Madya melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan rekomendasi analisis kebencanaan, penanggulangan kebencanaan; dan bencana penyelenggaraan dan penyuluhan
- 4) Analis Kebencanaan Ahli Utama melaksanakan penyusunan, pengembangan strategi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana

b. Pranata Kebencanaan

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi teknis kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan. Ruang lingkup kegiatan pada setiap jenjang jabatan meliputi:

- 1) Pranata Kebencanaan pemula melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 2) Pranata Kebencanaan terampil melakukan pengumpulan data dan pemetaan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 3) Pranata Kebencanaan mahir melaksanakan kegiatan operasional dan penanggulangan kebencanaan; dan teknis bencana penyelenggaraan dan penyuluhan
- 4) Pranata Kebencanaan penyelia melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.
- 5) Selain tugas tersebut di atas, Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dapat diberikan tugas lainnya oleh pimpinan.

7. Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

1.3. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah

a. Rincian Aparatur Sipil Negara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya ASN sebanyak 38 orang, terdiri dari PNS sebanyak 22 orang PPPK 11 Orang, CPNS 4 Orang dan PPPK paru waktu sebanyak 1 orang.

Tabel 1.1
Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	14	8	22
2	PPPK	10	1	11
3	CPNSD	2	2	4
4	PPPK Paru Waktu	1	-	1
Jumlah		27	11	38

Sumber: Olahan BPBD Tahun 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 38 orang pegawai Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari PNS sebanyak 22 orang atau 57,89%, PPPK sebanyak 11 orang atau 28,94%, CPNS sebanyak 4 orang atau 10,54% dan 1 orang merupakan PPPK paru waktu atau 2,63%, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, terdapat 27 orang atau 71,05% berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang atau 28,94% berjenis kelamin perempuan. Per posisi tanggal 31 Desember 2025, jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada BPBD Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat pengurangan pegawai yang disebabkan oleh 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang memasuki masa pensiun. Sumber daya aparatur merupakan faktor paling krusial dalam organisasi pemerintahan daerah. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan publik di era globalisasi, aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui proses pembelajaran berkelanjutan.

b. Kualifikasi Pendidikan

Tingkat pendidikan ASN menjadi indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan;

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	15
4.	DIII	4
5.	S1	15
	Jumlah	36

Sumber: Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

Kualifikasi Pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari pegawai yang berpendidikan SD 1 Orang, SLTP 1 orang, SLTA 15 Orang, Diploma III 4 Orang dan 15 Orang berpendidikan sarjana.

ASN dalam struktur birokrasi memiliki jenjang pangkat dan golongan yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki.

c. Pagkat dan Golongan

Sistem pangkat bersifat berjenjang dan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan karier, penggajian, serta pembinaan pegawai. ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
A.	PNS	24
1	Pembina Utama Muda/IV c	1
2	Pembina Tingkat /IV b	-
3	Pembina/IV a	3
4	Penata Tingkat I/III d	7
5	Penata/III c	-
6	Penata Muda Tingkat I/III b	-
7	Penata Muda/III a	9
8	Pengatur Tingkat I /II d	-
9	Pengatur /II c	3
10.	Pengatur Muda/II a	1
B	PPPK	11
1	Golongan IX	1
2	Golongan VII	1
3	Golongan V	9
C	PPPK Paru Waktu	1
1	Golongan V	1
	Jumlah	36

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

Penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 4 orang Golongan IV, 16 orang Golongan III, 4 orang Golongan II dan 1 orang dengan golongan IX, 1 orang golongan VII, dan 10 Orang golongan V.

d. Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta membentuk sikap dan perilaku kepemimpinan aparatur. Pelaksanaan Diklat PIM ditujukan agar aparatur pemerintah dapat memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang didudukinya. Dengan mengikuti Diklat PIM, seorang pejabat struktural diharapkan mampu mengembangkan karakter kepemimpinan yang sesuai dengan level jabatannya, sehingga dapat menjalankan fungsi manajerial, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara efektif dalam rangka mendukung kinerja organisasi pemerintahan. Berikut data Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka:

Tabel 1.4
Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No.	Uraian	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	ASN Yang belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1	PIM II	-	1
2	PIM III	-	4
3	PIM IV	4	2
	Jumlah	4	7

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

e. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II-B 1 orang, Eselon III-B 4 orang, Eselon IV-A 1 orang, Jabatan Fungsional Tertentu 11 orang yang terdiri dari Analis Kebencanaan 2 orang, Penata Penanggulangan Bencana 3 orang, Perencana 2 orang, dan Fungsional Umum 10 orang. secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 1.5
Jabatan Struktural dan Fungsional ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
A.	Struktural			
1	Eselon II-B	1	1	-
2	Eselon III-B	4	3	1
3	Eselon IV-A	1	-	1

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
B.	Fungsional			
1	Analisis Kebencanaan	1	1	-
2	Penata Penanggulangan Bencana	3	1	2
3	Perencana	3	1	2
4	Penatalaksana barang kantor	2	1	1
5	Analisis Bencana Ahli pertama	2	1	1
6	Fungsional Umum	7	5	2
C.	PPPK	12	11	1
	Jumlah :	36	25	11

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

1.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mengelola anggaran sebesar Rp. 3.115.376.419-. Dari rencana belanja Daerah sebesar Rp. 3.115.376.419-, sampai akhir tahun anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar RP. 2.736.544.700,- atau 87,84 %. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 1.6
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.599.047.019	2.328.974.176	270.072.843	89.61
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.373.200	19.326.200	47.000	99.76
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.373.200	19.326.200	47.000	99.76
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.951.761.091	1.747.614.211	204.146.880	89.54
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.877.073.091	1.672.928.211	204.144.880	89.12
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	74.688.000	74.686.000	2.000	100.00
	Kegiatan			131.603.239	1.910.261	98.57

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		133.513.500			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.712.700	1.199.000	513.700	70.01
		Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.584.600	7.402.550	182.050	97.60
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000	10.470.000	30.000	99.70
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.751.200	6.751.200	-	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.965.000	105.780.489	1.184.511	98.89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		14.338.800	14.120.550	236.250	98.35
		Pengadaan mebel	0,00	0	0	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.338.800	14.102.550	236.250	98.35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92.434.848	70.618.722	21.816.126	76.40
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.944.860	48.986.431	14.959.429	76.61
		Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	28.489.988	21.632.291	6.857.697	75.93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		387.625.580	345.709.254	41.916.326	89.19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan	378.025.580	341.004.254	37.021.326	90.21
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	9.600.000	4.705.000	4.895.000	49.01
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	0	0	0	0.00
	PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA		516.329.400	407.570.524	108.758.876	78.94

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase (%)
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		156.823.100	120.654.296	36.168.804	76,94
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	61.562.600	48.798.420	12.764.180	79.27
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	95.260.500	71.855.876	23.404.624	75.43
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		271.328.100	199.122.028	72.206.072	73.39
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	198.073.700	172.159.357	25.914.343	86.92
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	73.254.400	26.962.671	46.291.729	36.81
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		88.178.200	87.794.200	384.000	99.56
		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	88.178.200	87.794.200	384.000	99.56
	BPBD	Total	3.115.376.419	2.736.544.700	378.831.719	87.84

1.5. Pelaksanaan program berdasarkan urusan pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi anggaran dan Realiasasi Belanja

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Untuk program ini dilaksanakan dengan 6 kegiatan 15 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.599.047.019,- terealisasi sebesar Rp. 2.328.974.176,- atau mencapai 89,61 %, dapat dirinci sebagai berikut :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.373.200.- terealisasi sebesar Rp. 19.326.200.- atau mencapai 99,76 %,.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.951.761.091.- terealisasi sebesar Rp. 1.747.614.211.- atau mencapai 89,54 %, berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun dengan Sub Kegiatan sebagai beriku :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.877.073.091,- terealisasi sebesar Rp. 1.672.928.211,- atau mencapai 89,12 %.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar :Rp. 74.688.000.- sampai dengan Desember 2025 terealisasi sebesar : Rp. 74.686.000,- atau sebesar 100,00 %
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 133.513.500.- terealisasi sebesar Rp. 131.603.239.- Atau mencapai 98,57 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.712.700.- terealisasi sebesar Rp. 1.199.000,- atau mencapai 70,01 %.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.584.600 terealisasi sebesar Rp. 7.402.550,- atau mencapai 97,60 %.
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.500.000.- terealisasi sebesar Rp. 10.470.000.- atau mencapai 99,70 %.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.751.200.- terealisasi sebesar Rp.6.751.200.- atau mencapai 100 %.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.965.000.- terealisasi sebesar Rp. 105.780.489.- atau mencapai 98,89 %.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.338.800,- terealisasi sebesar Rp. 14.120.550,- Atau mencapai 98,35 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,00,- terealisasi sebesar Rp. 0,00.- atau mencapai 0,00 %.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.338.800,- terealisasi sebesar Rp. 14.102.550.- atau mencapai 98,35 %.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 92.434.848,- terealisasi sebesar Rp. 70.618.722,- Atau mencapai 76.40 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.944.860,- terealisasi sebesar Rp. 48.986.431.- atau mencapai 76,61 %.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.489.988,- terealisasi sebesar Rp. 21.632.291.- atau mencapai 75,93 %.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 387.625.580,- terealisasi sebesar Rp. 345.709.254.- atau mencapai 89,19 %.
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.025.580,- terealisasi sebesar Rp. 341.004.254.- atau mencapai 90,21 %.
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.705.000.- atau mencapai 49,01 %.
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,00,- terealisasi sebesar Rp.0,00.- atau mencapai 0,00 %
- b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini di dukung oleh 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 516.329.400.- dan realisasi sampai dengan bulan desember sebesar Rp. 407.570.524.- atau sebesar 78.94 %

 1. Kegiatan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 156.823.100.- sampai dengan bulan desember 2025 realisasi sebesar Rp. 120.654.296.- atau sebesar 76,94 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan alokasi anggaran Rp. 61.562.600.-dan sampai dengan bulan desember 2025 realisasi sebesar Rp. 48.798.420.- atau sebesar 79,27 %
 - b. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran

Rp. 95.260.500.- dengan realisasi Rp.71.855.876.-atau sebesar 75,43%

2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Korban Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 271.328.100,- realisasi sebesar Rp. 199.122.028 atau sebesar 73.39 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.073.700.-realisasi sebesar Rp.172.159.357 atau sebesar 73,39%

b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp.73.254.400.-realiasi Rp.26.962.671.- atau sebesar 36,81%

3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.178.200.- realiasi Rp. 87.794.200.- atau sebesar 99,56% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.178.200.- realisasi Rp. 87.794.200.- atau sebesar 99.56%



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2025.

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Tujuan dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
- c. Menyusun pohon kinerja;
- d. Menyusun cascading;
- e. Menyusun Rencana Aksi;
- f. Melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ); dan
- h. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

1. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
- b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- k. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- l. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

3. Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

1. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;

- b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- k. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- l. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas

3. Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penyelenggaraan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
	Tujuan ; Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	$R = H \times \frac{V}{C}$ dimana : H dan V diasumsikan Konstan; H : Kemungkinan Kejadian dan Besaran Dampak yang Timbul; V : Tingkat Kerentanan pada suatu wilayah tertentu; C : Tingkat Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Indeks				
	Sasaran :							
1.	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Potensi Penduduk Terpapar	Jumlah Penduduk Terpapar Bencana	Jiwa				
		Potensi Kerugian Ekonomi	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupiah				
		Potensi Kerugian Fisik	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupiah				
		Potensi Kerugian Lingkungan	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupiah				
		Indeks Ketahanan Daerah	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Hektar				

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Angka				
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penanganan Bencana		DAU
					Kegiatan : Pelayanan Informasih Rawan Bencana kabupaten / kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	DAU
					Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasih dan Edukasi (KIE) rawan Bencana kabupaten / kota per jenis bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)		
					Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		
					Kegiatan : Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase dokumen respon cepat dan logistik	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	DAU
					Sub Kegiatan : Respon Cepat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)		
					Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten / Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase dokumen pascabencana, regulasi, pemanfaatan sistem dan peningkatan kapasitas aparatur	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	DAU
					Sub Kegiatan : Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Sekretariat	DAU
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		DAU
					Sub Kegiatan : Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		
					Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
					Keuangan SKPD			
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase dokumen admistrasi, komponen listrik dan peralatan kantor serta paket cetakan dan penggandaan		DAU
					Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		
					Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase unit pengadaan barang dan jasa		DAU
					Sub kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		
					Sub Kegiatan; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
					Kegiatan; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan pelayanan umum kantor		DAU
					Sub kegiatan ; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Kegiatan; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase unit peralatan dan mesin, kendaraan dan gedung kantor		DAU
					Sub kegiatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		
					Sub Kegiatan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
					Sub Kegiatan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		

2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 maka capaian kinerja yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.
Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	IKK Output	Capaian	IKK Outcome	Rumusan	Keterangan
1	a. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah / legal	0	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-
	b. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	600 Orang			Belum memiliki peta rawan bencana
2	a. Persentase Penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum memiliki dokumen RPB
	b. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / legal	1			
	c. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	0			
	d. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	0			
	e. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1317			
	f. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	tidak ada			
3	a. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-

No	IKK Output	Capaian	IKK Outcome	Rumusan	Keterangan
	b. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	5 Surat Keputusan Darurat Bencana			100 %
	c. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	55 Personil / Petugas			100 %
	d. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0 Orang			



BAB III

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

3.1 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar berupa urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Daerah, adalah :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mencapai Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat dukungan dana yang cukup, untuk Tahun Anggaran 2025 pemerintah telah menyiapkan Alokasi Anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud. Adapun target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM pada tahun 2025 adalah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Untuk Tahun 2025 BPBD melakukan sosialisasi di 5 sekolah dan 5 desa.
- Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) merupakan salah satu dokumen penting BPBD yang harus dimiliki. Sampai dengan akhir tahun 2025 dokumen ini belum final dalam penyusunannya.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan 1 kegiatan 2 sub kegiatan yaitu:

a) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;

3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maka perlu mendapat dukungan anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud, terutama anggaran yang berkaitan dengan pemenuhan dokumen-dokumen wajib kebencanaan seperti kajian risiko bencana, rencana kontijensi, dokumen penanggulangan bencana, peta rawan bencana, dan dokumen wajib lainnya. Selain itu sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pemenuhan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka harus ditingkatkan atau ditambah sehingga dapat mendukung pemenuhan pencapaian SPM.

c. Dukungan Personil

Jumlah staf atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya ASN sebanyak 38 orang, terdiri dari PNS sebanyak 22 orang PPPK 11 Orang, CPNS 4 Orang dan PPPK paru waktu sebanyak 1 orang. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada BPBD Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat pengurangan pegawai yang disebabkan oleh 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang memasuki masa pensiun.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain :

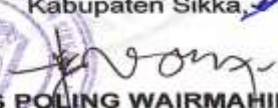
1. Kurangnya disiplin dan profesionalisme aparatur;
2. Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas;
3. Terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan beberapa program/kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
4. Kurangnya peralatan kerja operasional dan fasilitas kerja;
5. Kurangnya personil dan SDM yang berkompeten dalam penanganan bencana;
6. Belum adanya dokumen kajian Risiko Bencana atau dokumen wajib Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat diberikan yakni:

- 1. Perlu diberikan pembinaan disiplin terhadap aparatur yang kurang disiplin dalam bekerja;
- 2. Perlu diberikan pelatihan-pelatihan atau bimtek kepada aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 3. Perlu ditingkatkan atau dibangun koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas;
- 4. Pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana perlu dianggarkan secara khusus (prioritas) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kabupaten Sikka;
- 5. Perlu dilakukan penambahan personil dengan kualifikasi teknis dan computer sesuai kebutuhan bencana;
- 6. Perlu ditingkatkan Fasilitas Gedung,Ruang Kerja sarana penunjang operasional dan penanganan bencana;
- 7. Penyusunan Dokumen Kaian Risiko Bencana atau Dokumen wajib Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tabel 3.1
LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA.
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	JUMLAH PERSONIL	KETERANGAN
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	600 Orang	600 Orang	156.823.100	15 Orang	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0 Orang	0 Orang	0,00		
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Dokumen	5 Dokumen	271.328.100	38 Orang	

Maumere, 10 Februari 2026
Pit. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Sikka,

PETRUS POLING WAIRMAHING, ST.MT.M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19690923 199903 1 007

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dilihat dari Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sikka dapat disimpulkan bahwa Penanganan Penanggulangan Bencana sangat kompleks dan melibatkan langsung instansi-instansi terkait, LSM pendamping, serta lokasi daerah potensi rawan bencana yang akan berdampak langsung pada masyarakat korban bencana.

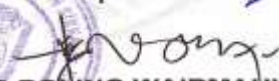
4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya dukungan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah khusus untuk kebutuhan sarana dan prasarana saat tanggap darurat, mengingat sangat minimnya prasarana pada BPBD saat ini.
3. Perlu adanya penambahan Personil dengan kualifikasi kebencanaan, teknis dan teknologi.
4. Perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Sikka.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, 10 Februari 2026
Pit. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Sikka



PETRUS POLING WAIRMAHING, ST.MT.M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19690923 199903 1 007





JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN

BENCANA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA				KETERANGAN
		SOSIALISA SI TATAP MUKA	SOSIALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WAHANA MULTIMEDIA	PENYEDIAA N DAN PEMASANG AN RAMBU EVAKUASI	PAPAN INFORMASI PUBLIK	
1.	Kangae	200	50	4		Melampirkan dokumentasi kegiatan dan absen peserta
2.	Waigete	60	50	9		
3	Mapitara	-	-	6		
4	Kewapante	120	50	5		
5	Doreng	-	-	4		
6	Hewokloang	-	-	-		
7	Alok Timur	-	75	3		
8	Waiblama		-	2		
9	Alok	100	100	6		
10	Alok Barat	-	50	5		
11	Talibura	-	25	66		
12	Bola	-	20	3		
13	Nele	-	20	-		
14	Nita	-	-	2		
15	Koting	-	15	2		
16	Lela	-	-	2		
17	Paga	-	10	2		
18	Mego	-	-	-		
19	Tanawawo	-	-	2		
20	Magepanda	120	50	3		
21	Palue	-	-	-		
Jumlah		600 Orang	495	123		

Maumere, 31 Desember 2025

Plo Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,


JOHANNES B.C. PIJTU BOTHA, ST
NIP.19741115 200012 1 005

Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan

1. Sosialisasi Destana

a. Desa Langir Kecamatan Kangae

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Mayor No. 28 Telp. (091) 5000000, email: bapbdsikka@gmail.com NO. 6.1.2018.0.0.0			
DAFTAR HADIR			
Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023 Jam : 08.00 s.d. selesai Tempat : Aula Kantor Desa Langir, Kecamatan Kangae Acara : Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)			
No. & N. A.		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.
6.	6.	6.	6.
7.	7.	7.	7.
8.	8.	8.	8.
9.	9.	9.	9.
10.	10.	10.	10.
11.	11.	11.	11.
12.	12.	12.	12.
13.	13.	13.	13.
14.	14.	14.	14.
15.	15.	15.	15.
16.	16.	16.	16.
17.	17.	17.	17.
18.	18.	18.	18.
19.	19.	19.	19.
20.	20.	20.	20.
21.	21.	21.	21.
22.	22.	22.	22.
23.	23.	23.	23.
24.	24.	24.	24.
25.	25.	25.	25.
26.	26.	26.	26.
27.	27.	27.	27.
28.	28.	28.	28.
29.	29.	29.	29.
30.	30.	30.	30.
31.	31.	31.	31.
32.	32.	32.	32.
33.	33.	33.	33.
34.	34.	34.	34.
35.	35.	35.	35.
36.	36.	36.	36.
37.	37.	37.	37.
38.	38.	38.	38.
39.	39.	39.	39.
40.	40.	40.	40.
41.	41.	41.	41.
42.	42.	42.	42.
43.	43.	43.	43.
44.	44.	44.	44.
45.	45.	45.	45.
46.	46.	46.	46.
47.	47.	47.	47.
48.	48.	48.	48.
49.	49.	49.	49.
50.	50.	50.	50.
51.	51.	51.	51.
52.	52.	52.	52.
53.	53.	53.	53.
54.	54.	54.	54.
55.	55.	55.	55.
56.	56.	56.	56.
57.	57.	57.	57.
58.	58.	58.	58.
59.	59.	59.	59.
60.	60.	60.	60.
61.	61.	61.	61.
62.	62.	62.	62.
63.	63.	63.	63.
64.	64.	64.	64.
65.	65.	65.	65.
66.	66.	66.	66.
67.	67.	67.	67.
68.	68.	68.	68.
69.	69.	69.	69.
70.	70.	70.	70.
71.	71.	71.	71.
72.	72.	72.	72.
73.	73.	73.	73.
74.	74.	74.	74.
75.	75.	75.	75.
76.	76.	76.	76.
77.	77.	77.	77.
78.	78.	78.	78.
79.	79.	79.	79.
80.	80.	80.	80.
81.	81.	81.	81.
82.	82.	82.	82.
83.	83.	83.	83.
84.	84.	84.	84.
85.	85.	85.	85.
86.	86.	86.	86.
87.	87.	87.	87.
88.	88.	88.	88.
89.	89.	89.	89.
90.	90.	90.	90.
91.	91.	91.	91.
92.	92.	92.	92.
93.	93.	93.	93.
94.	94.	94.	94.
95.	95.	95.	95.
96.	96.	96.	96.
97.	97.	97.	97.
98.	98.	98.	98.
99.	99.	99.	99.
100.	100.	100.	100.



b. Desa Done Kecamatan Magepanda

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Mayor No. 28 Telp. (091) 5000000, email: bapbdsikka@gmail.com NO. 6.1.2018.0.0.0			
DAFTAR HADIR			
Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2023 Jam : 08.00 s.d. selesai Tempat : Aula Kantor Desa Done, Kecamatan Magepanda Acara : Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)			
No. & N. A.		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.
6.	6.	6.	6.
7.	7.	7.	7.
8.	8.	8.	8.
9.	9.	9.	9.
10.	10.	10.	10.
11.	11.	11.	11.
12.	12.	12.	12.
13.	13.	13.	13.
14.	14.	14.	14.
15.	15.	15.	15.
16.	16.	16.	16.
17.	17.	17.	17.
18.	18.	18.	18.
19.	19.	19.	19.
20.	20.	20.	20.
21.	21.	21.	21.
22.	22.	22.	22.
23.	23.	23.	23.
24.	24.	24.	24.
25.	25.	25.	25.
26.	26.	26.	26.
27.	27.	27.	27.
28.	28.	28.	28.
29.	29.	29.	29.
30.	30.	30.	30.
31.	31.	31.	31.
32.	32.	32.	32.
33.	33.	33.	33.
34.	34.	34.	34.
35.	35.	35.	35.
36.	36.	36.	36.
37.	37.	37.	37.
38.	38.	38.	38.
39.	39.	39.	39.
40.	40.	40.	40.
41.	41.	41.	41.
42.	42.	42.	42.
43.	43.	43.	43.
44.	44.	44.	44.
45.	45.	45.	45.
46.	46.	46.	46.
47.	47.	47.	47.
48.	48.	48.	48.
49.	49.	49.	49.
50.	50.	50.	50.
51.	51.	51.	51.
52.	52.	52.	52.
53.	53.	53.	53.
54.	54.	54.	54.
55.	55.	55.	55.
56.	56.	56.	56.
57.	57.	57.	57.
58.	58.	58.	58.
59.	59.	59.	59.
60.	60.	60.	60.
61.	61.	61.	61.
62.	62.	62.	62.
63.	63.	63.	63.
64.	64.	64.	64.
65.	65.	65.	65.
66.	66.	66.	66.
67.	67.	67.	67.
68.	68.	68.	68.
69.	69.	69.	69.
70.	70.	70.	70.
71.	71.	71.	71.
72.	72.	72.	72.
73.	73.	73.	73.
74.	74.	74.	74.
75.	75.	75.	75.
76.	76.	76.	76.
77.	77.	77.	77.
78.	78.	78.	78.
79.	79.	79.	79.
80.	80.	80.	80.
81.	81.	81.	81.
82.	82.	82.	82.
83.	83.	83.	83.
84.	84.	84.	84.
85.	85.	85.	85.
86.	86.	86.	86.
87.	87.	87.	87.
88.	88.	88.	88.
89.	89.	89.	89.
90.	90.	90.	90.
91.	91.	91.	91.
92.	92.	92.	92.
93.	93.	93.	93.
94.	94.	94.	94.
95.	95.	95.	95.
96.	96.	96.	96.
97.	97.	97.	97.
98.	98.	98.	98.
99.	99.	99.	99.
100.	100.	100.	100.



c. Desa Teku Iku Kecamatan Kangae

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Mayor No. 28 Telp. (091) 5000000, email: bapbdsikka@gmail.com NO. 6.1.2018.0.0.0			
DAFTAR HADIR			
Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2023 Jam : 08.00 s.d. selesai Tempat : Aula Kantor Desa Teku Iku, Kecamatan Kangae Acara : Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)			
No. & N. A.		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.
6.	6.	6.	6.
7.	7.	7.	7.
8.	8.	8.	8.
9.	9.	9.	9.
10.	10.	10.	10.
11.	11.	11.	11.
12.	12.	12.	12.
13.	13.	13.	13.
14.	14.	14.	14.
15.	15.	15.	15.
16.	16.	16.	16.
17.	17.	17.	17.
18.	18.	18.	18.
19.	19.	19.	19.
20.	20.	20.	20.
21.	21.	21.	21.
22.	22.	22.	22.
23.	23.	23.	23.
24.	24.	24.	24.
25.	25.	25.	25.
26.	26.	26.	26.
27.	27.	27.	27.
28.	28.	28.	28.
29.	29.	29.	29.
30.	30.	30.	30.
31.	31.	31.	31.
32.	32.	32.	32.
33.	33.	33.	33.
34.	34.	34.	34.
35.	35.	35.	35.
36.	36.	36.	36.
37.	37.	37.	37.
38.	38.	38.	38.
39.	39.	39.	39.
40.	40.	40.	40.
41.	41.	41.	41.
42.	42.	42.	42.
43.	43.	43.	43.
44.	44.	44.	44.
45.	45.	45.	45.
46.	46.	46.	46.
47.	47.	47.	47.
48.	48.	48.	48.
49.	49.	49.	49.
50.	50.	50.	50.
51.	51.	51.	51.
52.	52.	52.	52.
53.	53.	53.	53.
54.	54.	54.	54.
55.	55.	55.	55.
56.	56.	56.	56.
57.	57.	57.	57.
58.	58.	58.	58.
59.	59.	59.	59.
60.	60.	60.	60.
61.	61.	61.	61.
62.	62.	62.	62.
63.	63.	63.	63.
64.	64.	64.	64.
65.	65.	65.	65.
66.	66.	66.	66.
67.	67.	67.	67.
68.	68.	68.	68.
69.	69.	69.	69.
70.	70.	70.	70.
71.	71.	71.	71.
72.	72.	72.	72.
73.	73.	73.	73.
74.	74.	74.	74.
75.	75.	75.	75.
76.	76.	76.	76.
77.	77.	77.	77.
78.	78.	78.	78.
79.	79.	79.	79.
80.	80.	80.	80.
81.	81.	81.	81.
82.	82.	82.	82.
83.	83.	83.	83.
84.	84.	84.	84.
85.	85.	85.	85.
86.	86.	86.	86.
87.	87.	87.	87.
88.	88.	88.	88.
89.	89.	89.	89.
90.	90.	90.	90.
91.	91.	91.	91.
92.	92.	92.	92.
93.	93.	93.	93.
94.	94.	94.	94.
95.	95.	95.	95.
96.	96.	96.	96.
97.	97.	97.	97.
98.	98.	98.	98.
99.	99.	99.	99.
100.	100.	100.	100.



d. Desa Kokowahor Kecamatan Kangae

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
S I K K A

DAFTAR HADIR

Waktu/Tanggal: 1. Hari, 18 Juni 2025
2. 09.00 s.d. selesai
Tempat: 1. Aula Kantor Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae
Acara: 1. Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

No	N. A. M. A.	KEBANTUAN	TAMBAH TANGKUP
1.	Indra Sulita, S. S. S.	Sekretaris	1
2.	Purnawidya, S. S. S.	Anggota	2
3.	PETRIK, HARPAZI, ANHANI	Anggota	3
4.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	4
5.	Rahman, S. S. S.	Anggota	5
6.	Syahrul, S. S. S.	Anggota	6
7.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	7
8.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	8
9.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	9
10.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	10
11.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	11
12.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	12
13.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	13
14.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	14
15.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	15
16.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	16
17.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	17
18.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	18
19.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	19
20.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	20
21.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	21
22.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	22
23.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	23
24.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	24
25.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	25
26.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	26
27.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	27
28.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	28
29.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	29
30.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	30

Mengetahui:
Kepala Desa Kokowahor
S. S. S.

Mengetahui:
Ketua Panitia
S. S. S.

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
Di Desa Kokowahor Kecamatan Kangae, Tanggal 18 Juni 2025

e. Desa Magepanda Kecamatan Magepanda

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
S I K K A

DAFTAR HADIR

Waktu/Tanggal: 1. Hari, 30 Juni 2025
2. 09.00 s.d. selesai
Tempat: 1. Aula Kantor Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda
Acara: 1. Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

No	N. A. M. A.	KEBANTUAN	TAMBAH TANGKUP
1.	Indra Sulita, S. S. S.	Sekretaris	1
2.	Purnawidya, S. S. S.	Anggota	2
3.	PETRIK, HARPAZI, ANHANI	Anggota	3
4.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	4
5.	Rahman, S. S. S.	Anggota	5
6.	Syahrul, S. S. S.	Anggota	6
7.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	7
8.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	8
9.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	9
10.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	10
11.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	11
12.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	12
13.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	13
14.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	14
15.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	15
16.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	16
17.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	17
18.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	18
19.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	19
20.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	20
21.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	21
22.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	22
23.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	23
24.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	24
25.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	25
26.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	26
27.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	27
28.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	28
29.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	29
30.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	30

Mengetahui:
Kepala Desa Magepanda
S. S. S.

Mengetahui:
Ketua Panitia
S. S. S.

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda, Tanggal 30 Juni 2025

2. Sosialisasi KIE

a. SDI Habi

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
S I K K A

DAFTAR HADIR

Waktu/Tanggal: 1. Hari, 18 Juni 2025
2. 09.00 s.d. selesai
Tempat: 1. Aula Kantor Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae
Acara: 1. Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

No	N. A. M. A.	KEBANTUAN	TAMBAH TANGKUP
1.	Indra Sulita, S. S. S.	Sekretaris	1
2.	Purnawidya, S. S. S.	Anggota	2
3.	PETRIK, HARPAZI, ANHANI	Anggota	3
4.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	4
5.	Rahman, S. S. S.	Anggota	5
6.	Syahrul, S. S. S.	Anggota	6
7.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	7
8.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	8
9.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	9
10.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	10
11.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	11
12.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	12
13.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	13
14.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	14
15.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	15
16.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	16
17.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	17
18.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	18
19.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	19
20.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	20
21.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	21
22.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	22
23.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	23
24.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	24
25.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	25
26.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	26
27.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	27
28.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	28
29.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	29
30.	Yusuf, S. S. S.	Anggota	30

Mengetahui:
Kepala Desa Kokowahor
S. S. S.

Mengetahui:
Ketua Panitia
S. S. S.

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI DI SEKOLAH
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Di SDI Habi Kecamatan Kangae

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 (BPBD) Kabupaten Sukoharjo
 Jl. Veteran No. 20 Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah 50514
 Telp. (0271) 8611111, 8611112, 8611113, 8611114, 8611115, 8611116, 8611117, 8611118, 8611119, 8611120, 8611121, 8611122, 8611123, 8611124, 8611125, 8611126, 8611127, 8611128, 8611129, 8611130, 8611131, 8611132, 8611133, 8611134, 8611135, 8611136, 8611137, 8611138, 8611139, 8611140, 8611141, 8611142, 8611143, 8611144, 8611145, 8611146, 8611147, 8611148, 8611149, 8611150, 8611151, 8611152, 8611153, 8611154, 8611155, 8611156, 8611157, 8611158, 8611159, 8611160, 8611161, 8611162, 8611163, 8611164, 8611165, 8611166, 8611167, 8611168, 8611169, 8611170, 8611171, 8611172, 8611173, 8611174, 8611175, 8611176, 8611177, 8611178, 8611179, 8611180, 8611181, 8611182, 8611183, 8611184, 8611185, 8611186, 8611187, 8611188, 8611189, 8611190, 8611191, 8611192, 8611193, 8611194, 8611195, 8611196, 8611197, 8611198, 8611199, 8611200, 8611201, 8611202, 8611203, 8611204, 8611205, 8611206, 8611207, 8611208, 8611209, 8611210, 8611211, 8611212, 8611213, 8611214, 8611215, 8611216, 8611217, 8611218, 8611219, 8611220, 8611221, 8611222, 8611223, 8611224, 8611225, 8611226, 8611227, 8611228, 8611229, 8611230, 8611231, 8611232, 8611233, 8611234, 8611235, 8611236, 8611237, 8611238, 8611239, 8611240, 8611241, 8611242, 8611243, 8611244, 8611245, 8611246, 8611247, 8611248, 8611249, 8611250, 8611251, 8611252, 8611253, 8611254, 8611255, 8611256, 8611257, 8611258, 8611259, 8611260, 8611261, 8611262, 8611263, 8611264, 8611265, 8611266, 8611267, 8611268, 8611269, 8611270, 8611271, 8611272, 8611273, 8611274, 8611275, 8611276, 8611277, 8611278, 8611279, 8611280, 8611281, 8611282, 8611283, 8611284, 8611285, 8611286, 8611287, 8611288, 8611289, 8611290, 8611291, 8611292, 8611293, 8611294, 8611295, 8611296, 8611297, 8611298, 8611299, 8611300, 8611301, 8611302, 8611303, 8611304, 8611305, 8611306, 8611307, 8611308, 8611309, 8611310, 8611311, 8611312, 8611313, 8611314, 8611315, 8611316, 8611317, 8611318, 8611319, 8611320, 8611321, 8611322, 8611323, 8611324, 8611325, 8611326, 8611327, 8611328, 8611329, 8611330, 8611331, 8611332, 8611333, 8611334, 8611335, 8611336, 8611337, 8611338, 8611339, 8611340, 8611341, 8611342, 8611343, 8611344, 8611345, 8611346, 8611347, 8611348, 8611349, 8611350, 8611351, 8611352, 8611353, 8611354, 8611355, 8611356, 8611357, 8611358, 8611359, 8611360, 8611361, 8611362, 8611363, 8611364, 8611365, 8611366, 8611367, 8611368, 8611369, 8611370, 8611371, 8611372, 8611373, 8611374, 8611375, 8611376, 8611377, 8611378, 8611379, 8611380, 8611381, 8611382, 8611383, 8611384, 8611385, 8611386, 8611387, 8611388, 8611389, 8611390, 8611391, 8611392, 8611393, 8611394, 8611395, 8611396, 8611397, 8611398, 8611399, 8611400, 8611401, 8611402, 8611403, 8611404, 8611405, 8611406, 8611407, 8611408, 8611409, 8611410, 8611411, 8611412, 8611413, 8611414, 8611415, 8611416, 8611417, 8611418, 8611419, 8611420, 8611421, 8611422, 8611423, 8611424, 8611425, 8611426, 8611427, 8611428, 8611429, 8611430, 8611431, 8611432, 8611433, 8611434, 8611435, 8611436, 8611437, 8611438, 8611439, 8611440, 8611441, 8611442, 8611443, 8611444, 8611445, 8611446, 8611447, 8611448, 8611449, 8611450, 8611451, 8611452, 8611453, 8611454, 8611455, 8611456, 8611457, 8611458, 8611459, 8611460, 8611461, 8611462, 8611463, 8611464, 8611465, 8611466, 8611467, 8611468, 8611469, 8611470, 8611471, 8611472, 8611473, 8611474, 8611475, 8611476, 8611477, 8611478, 8611479, 8611480, 8611481, 8611482, 8611483, 8611484, 8611485, 8611486, 8611487, 8611488, 8611489, 8611490, 8611491, 8611492, 8611493, 8611494, 8611495, 8611496, 8611497, 8611498, 8611499, 8611500, 8611501, 8611502, 8611503, 8611504, 8611505, 8611506, 8611507, 8611508, 8611509, 8611510, 8611511, 8611512, 8611513, 8611514, 8611515, 8611516, 8611517, 8611518, 8611519, 8611520, 8611521, 8611522, 8611523, 8611524, 8611525, 8611526, 8611527, 8611528, 8611529, 8611530, 8611531, 8611532, 8611533, 8611534, 8611535, 8611536, 8611537, 8611538, 8611539, 8611540, 8611541, 8611542, 8611543, 8611544, 8611545, 8611546, 86115



DAFTAR HIBUR		DAFTAR HIBUR	
1. Nama 2. Tempat 3. Waktu 4. Jumlah		1. Nama 2. Tempat 3. Waktu 4. Jumlah	
1. Nama	2. Tempat	1. Nama	2. Tempat
3. Waktu	4. Jumlah	3. Waktu	4. Jumlah
5. Nama	6. Tempat	5. Nama	6. Tempat
7. Waktu	8. Jumlah	7. Waktu	8. Jumlah
9. Nama	10. Tempat	9. Nama	10. Tempat
11. Waktu	12. Jumlah	11. Waktu	12. Jumlah
13. Nama	14. Tempat	13. Nama	14. Tempat
15. Waktu	16. Jumlah	15. Waktu	16. Jumlah
17. Nama	18. Tempat	17. Nama	18. Tempat
19. Waktu	20. Jumlah	19. Waktu	20. Jumlah
21. Nama	22. Tempat	21. Nama	22. Tempat
23. Waktu	24. Jumlah	23. Waktu	24. Jumlah
25. Nama	26. Tempat	25. Nama	26. Tempat
27. Waktu	28. Jumlah	27. Waktu	28. Jumlah
29. Nama	30. Tempat	29. Nama	30. Tempat
31. Waktu	32. Jumlah	31. Waktu	32. Jumlah
33. Nama	34. Tempat	33. Nama	34. Tempat
35. Waktu	36. Jumlah	35. Waktu	36. Jumlah
37. Nama	38. Tempat	37. Nama	38. Tempat
39. Waktu	40. Jumlah	39. Waktu	40. Jumlah
41. Nama	42. Tempat	41. Nama	42. Tempat
43. Waktu	44. Jumlah	43. Waktu	44. Jumlah
45. Nama	46. Tempat	45. Nama	46. Tempat
47. Waktu	48. Jumlah	47. Waktu	48. Jumlah
49. Nama	50. Tempat	49. Nama	50. Tempat
51. Waktu	52. Jumlah	51. Waktu	52. Jumlah
53. Nama	54. Tempat	53. Nama	54. Tempat
55. Waktu	56. Jumlah	55. Waktu	56. Jumlah
57. Nama	58. Tempat	57. Nama	58. Tempat
59. Waktu	60. Jumlah	59. Waktu	60. Jumlah
61. Nama	62. Tempat	61. Nama	62. Tempat
63. Waktu	64. Jumlah	63. Waktu	64. Jumlah
65. Nama	66. Tempat	65. Nama	66. Tempat
67. Waktu	68. Jumlah	67. Waktu	68. Jumlah
69. Nama	70. Tempat	69. Nama	70. Tempat
71. Waktu	72. Jumlah	71. Waktu	72. Jumlah
73. Nama	74. Tempat	73. Nama	74. Tempat
75. Waktu	76. Jumlah	75. Waktu	76. Jumlah
77. Nama	78. Tempat	77. Nama	78. Tempat
79. Waktu	80. Jumlah	79. Waktu	80. Jumlah
81. Nama	82. Tempat	81. Nama	82. Tempat
83. Waktu	84. Jumlah	83. Waktu	84. Jumlah
85. Nama	86. Tempat	85. Nama	86. Tempat
87. Waktu	88. Jumlah	87. Waktu	88. Jumlah
89. Nama	90. Tempat	89. Nama	90. Tempat
91. Waktu	92. Jumlah	91. Waktu	92. Jumlah
93. Nama	94. Tempat	93. Nama	94. Tempat
95. Waktu	96. Jumlah	95. Waktu	96. Jumlah
97. Nama	98. Tempat	97. Nama	98. Tempat
99. Waktu	100. Jumlah	99. Waktu	100. Jumlah

[illegible]

e. SMPN 03 Naganghure



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Mayor No.20 Telp.08813005780, email: bpbdsikka@gmail.com

M A U N I F I K A S I

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Jumat, 13 Juni 2025

Jam: 08.00 s.d. selesai

Tempat: SMPN 03 Naganghure

Acara: Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (SIE) Bawan Bencana

NO	N. A. M. A	JARATAN	TANDA TANGAN
1.	Aurelia Yudhika Chandra	Siswa	1.
2.	Maria Widayanti Tob	Siswa	2.
3.	Maria Saniya Dosi Iku	Siswa	3.
4.	Maria Bonita Dosi Iku	Siswa	4.
5.	Ludovicus Nona Bendi	Siswa	5.
6.	Sybilus Maria Bendi	Siswa	6.
7.	Petersona Maria Bendi	Siswa	7.
8.	Maria Lelana Bendi	Siswa	8.
9.	Nyelia Bendi	Siswa	9.
10.	Aura Parania Bendi	Siswa	10.
11.	Maria Candra L. Terbitadi	Siswa	11.
12.	Dania Marwinda Lani Bendi	Siswa	12.
13.	Maria Bendi	Siswa	13.
14.	Maria Bendi	Siswa	14.
15.	Maria Bendi	Siswa	15.
16.	Maria Bendi	Siswa	16.
17.	Maria Bendi	Siswa	17.
18.	Maria Bendi	Siswa	18.
19.	Maria Bendi	Siswa	19.
20.	Maria Bendi	Siswa	20.
21.	Maria Bendi	Siswa	21.
22.	Maria Bendi	Siswa	22.
23.	Maria Bendi	Siswa	23.
24.	Maria Bendi	Siswa	24.
25.	Maria Bendi	Siswa	25.

Mengetahui:
Kepala SMPN 03 Naganghure,

NIP. 19741115 200012 1 005

PLN Kabupaten Sikka
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka

JOHANNIS BE. PUTALOTIRA, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

26.	Jessica Adina Wang Mawati	27.	28.
27.	Yohanes Maria L. M. D.	29.	30.
28.	Isabella Andriana Dendi	31.	32.
29.	Erasmus Andriana Dendi	33.	34.
30.	Erasmus Andriana Dendi	35.	36.
31.	Yohanes Maria L. M. D.	37.	38.
32.	Isabella Andriana Dendi	39.	40.
33.	Erasmus Andriana Dendi	41.	42.
34.	Yohanes Maria L. M. D.	43.	44.
35.	Isabella Andriana Dendi	45.	46.
36.	Erasmus Andriana Dendi	47.	48.
37.	Yohanes Maria L. M. D.	49.	50.
38.	Isabella Andriana Dendi	51.	52.
39.	Erasmus Andriana Dendi	53.	54.
40.	Yohanes Maria L. M. D.	55.	56.
41.	Isabella Andriana Dendi	57.	58.
42.	Erasmus Andriana Dendi	59.	60.

Mengetahui:
Kepala SMPN 03 Naganghure,

NIP. 19741115 200012 1 005

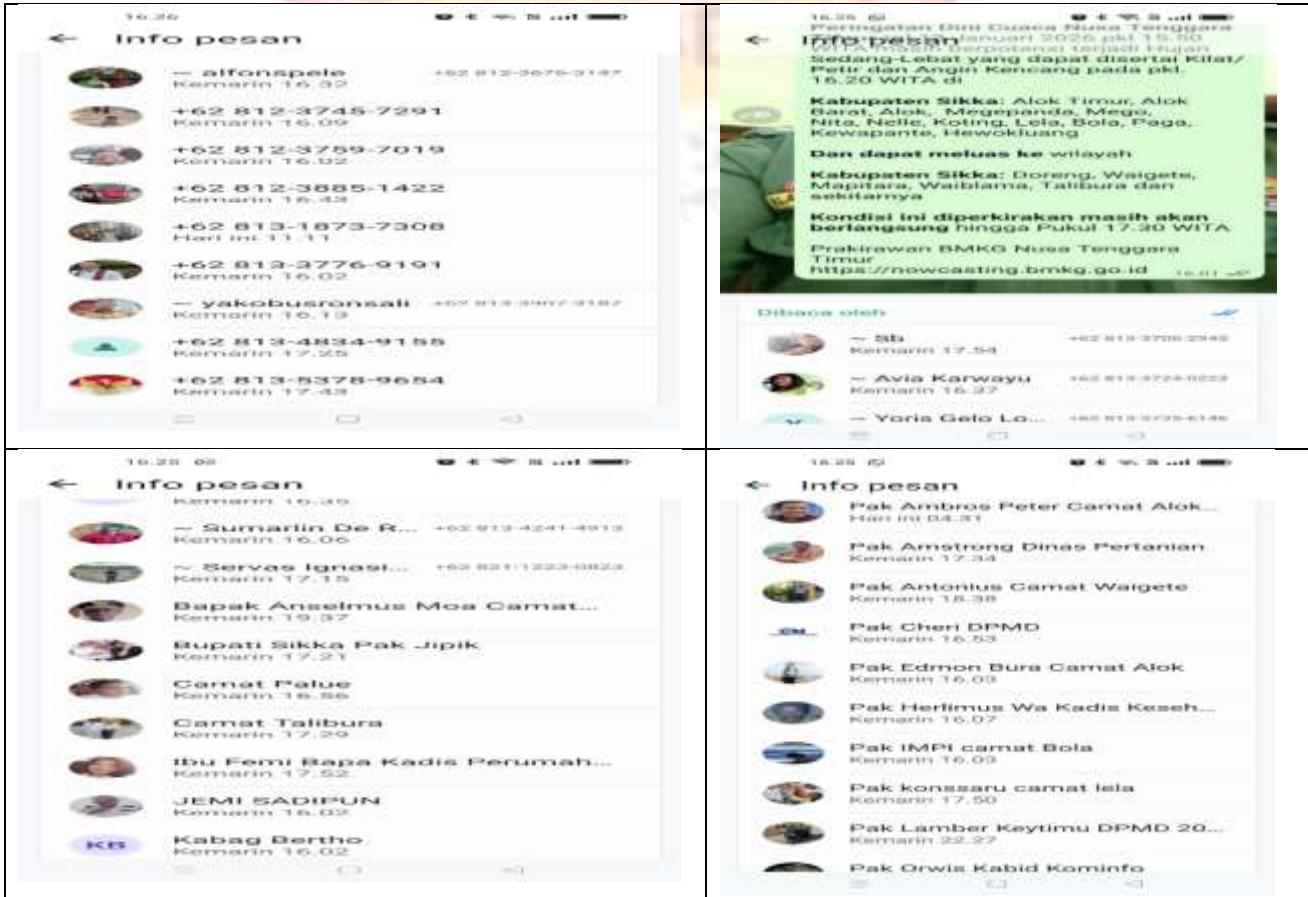
PLN Kabupaten Sikka
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka

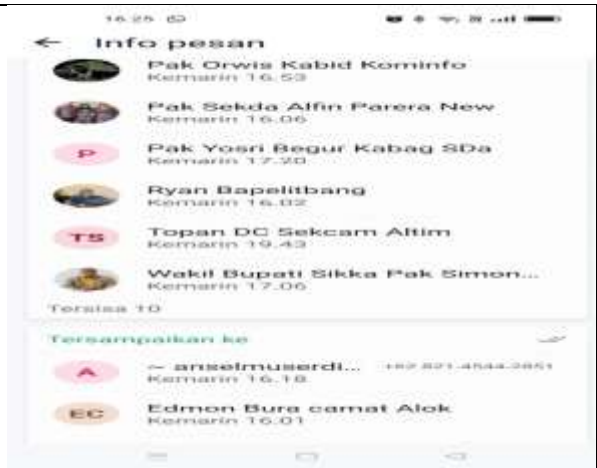
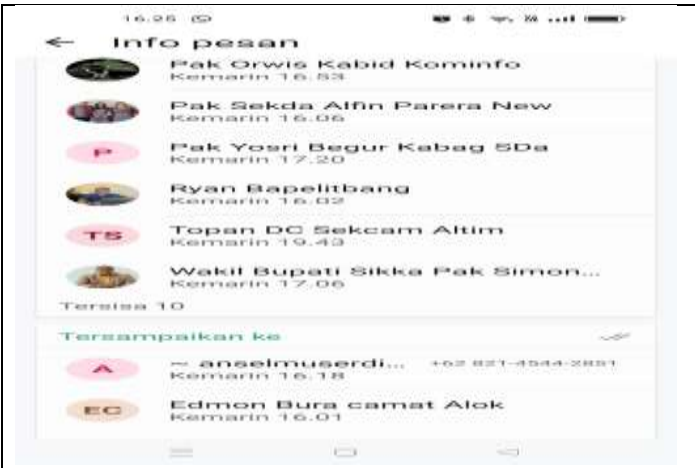
JOHANNIS BE. PUTALOTIRA, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

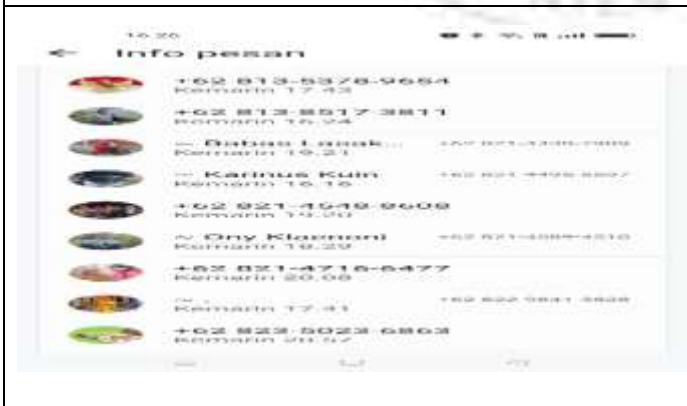
b. Pelatihan di BPJS Kecamatan Alok



4. Data Dukung Melalui Media Sosial









JUMLAH WARGA NEGARA USIA 15-64 TAHUN YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI TARGET YANG DITETAPKAN DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 15-64 TAHUN YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI TARGET YANG DITETAPKAN				KETERA NGAN
		SOSIALISA SI TATAP MUKA	SOSIALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WAHANA MULTIMEDIA	PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN RAMBU EVAKUASI	PAPAN INFORMASI PUBLIK	
1.	Kangae	75 orang				Melampi rkan dokume ntasi dan absen peserta
2.	Magepanda	50 Orang				
Jumlah						

Maumere, 31 Desember 2025

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka,



JOHANES B.C. PUTU BOTHA, ST

NIP.19741115 200012 1 005

Dokumentasi Jumlah Warga Negara Usia 15-64 Tahun yang memperoleh Layanan Informasih Rawan Bencana sesuai target yang di tetapkan di Kabupaten Sikka

 PENERBITAN KARTU BERPAJAK DIRA BADAN PERANGKOAN DAN CAKUI DAERAH (Dl) Nomor 161-17 Tahun 2016 tentang, pengalihan kewenangan penerbitan surat DAFTAR MASUK			
Kartu Tanggal Jenis Tempat Revisi		1. Nomor, 31 April 2018 2. dan 001/2018 3. Kantor Desa Lango, Kecamatan Kumpang 4. Asisten Pembendahara Desa Lango, Kecamatan Kumpang 5. D A R A	
		6. JABATAN 7. NAMA LENGKAP	
001	1. TIMOTHEUS DEPRIMAS PRISTIA P.	Kendak	1. 11
02	2. Ghilman Samsudin	Sekolah	2. 12
03	3. Suprianto Rung Bango	Induk Sui	3. 13
04	4. Yohanes Bani Sidi	Peran, Perumahan	4. 14
05	5. Mulya	Peran	5. 15
06	6. Gabriel Mariah	Peran	6. 16
07	7. Yohanes Plegias	Kota 100	7. 17
08	8. Yohanes Sidi	Perumahan	8. 18
09	9. Mulya	Kumpang	9. 19
10	10. Joke Sidi Doro	Peran, Perumahan	10. 20
11	11. Joke Sidi Doro	Peran, Doro	11. 21
12	12. Padi Sidi	Kota 100	12. 22
13	13. Mulya P. A. Kumpang	Peran	13. 23
14	14. Amokan Sidi	Peran	14. 24
15	15. Mulya Sidi	Peran	15. 25
16	16. Yohanes Mariah	Perumahan	16. 26
17	17. Yohanes Sidi	Peran	17. 27
18	18. Yohanes Sidi	Peran	18. 28
19	19. Yohanes Sidi	Peran	19. 29
20	20. Yohanes Sidi	Peran	20. 30
21	21. Yohanes Sidi	Peran	21. 31
22	22. Yohanes Sidi	Peran	22. 32
23	23. Yohanes Sidi	Peran	23. 33
24	24. Yohanes Sidi	Peran	24. 34
25	25. Yohanes Sidi	Peran	25. 35
26	26. Yohanes Sidi	Peran	26. 36
27	27. Yohanes Sidi	Peran	27. 37
28	28. Yohanes Sidi	Peran	28. 38
29	29. Yohanes Sidi	Peran	29. 39
30	30. Yohanes Sidi	Peran	30. 40

PEMERINTAH KABUPATEN BIRLA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(Bk. Monev BCB-21 Telp. 010-2400176, faksim. 010-2400177@gmail.com)
MAUMERI
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Juni 2023
 Waktu : 09.00 s.d. 12.00
 Lokasi : Aula Kantor Desa Cima, Kecamatan Mingsopada
 Acara : Sosialisasi Pemenuhan Kebutuhan Desa Tangguh Bencana (DETANA)

No	DAFTAR	TANDA TANGAN
1.	ABANGISMU KARTU	1. <i>[Signature]</i>
2.	Agusna Dep	2. <i>[Signature]</i>
3.	ALENGSUS Purnomo	3. <i>[Signature]</i>
4.	Amalia C. Mubiro	4. <i>[Signature]</i>
5.	Ameliana Sida	5. <i>[Signature]</i>
6.	Aswandiwa Juri	6. <i>[Signature]</i>
7.	Elvina Laga	7. <i>[Signature]</i>
8.	MARIA HANINDA	8. <i>[Signature]</i>
9.	MARIA FATMAH SOBA	9. <i>[Signature]</i>
10.	PHARO ADELIN JON	10. <i>[Signature]</i>
11.	Marika Shoma C. Wati	11. <i>[Signature]</i>
12.	YU FENITA Sumpaka	12. <i>[Signature]</i>
13.	Meru Nur	13. <i>[Signature]</i>
14.	Hendrikusna Nggala	14. <i>[Signature]</i>
15.	Alisa Rini	15. <i>[Signature]</i>
16.	YUSUF LERO	16. <i>[Signature]</i>
17.	RIKILIAS RAN	17. <i>[Signature]</i>
18.	Micahana Sari	18. <i>[Signature]</i>
19.	PLEXYIA RABA	19. <i>[Signature]</i>
20.	RASTIKA LERO	20. <i>[Signature]</i>
21.	YANERES JEGANT	21. <i>[Signature]</i>
22.	ROSE PUSPITA BKSRO	22. <i>[Signature]</i>
23.	Hendrikusna LERO	23. <i>[Signature]</i>
24.	Maria Aminda WREI	24. <i>[Signature]</i>
25.	WILLIAMINA B. DANI	25. <i>[Signature]</i>
26.	Triana Sidi	26. <i>[Signature]</i>

A. Kepala Desa Cima
 B. Kepala Desa Cima
 C. Kepala Desa Cima
 D. Kepala Desa Cima
 E. Kepala Desa Cima
 F. Kepala Desa Cima
 G. Kepala Desa Cima
 H. Kepala Desa Cima
 I. Kepala Desa Cima
 J. Kepala Desa Cima
 K. Kepala Desa Cima
 L. Kepala Desa Cima
 M. Kepala Desa Cima
 N. Kepala Desa Cima
 O. Kepala Desa Cima
 P. Kepala Desa Cima
 Q. Kepala Desa Cima
 R. Kepala Desa Cima
 S. Kepala Desa Cima
 T. Kepala Desa Cima
 U. Kepala Desa Cima
 V. Kepala Desa Cima
 W. Kepala Desa Cima
 X. Kepala Desa Cima
 Y. Kepala Desa Cima
 Z. Kepala Desa Cima
 AA. Kepala Desa Cima
 AB. Kepala Desa Cima
 AC. Kepala Desa Cima
 AD. Kepala Desa Cima
 AE. Kepala Desa Cima
 AF. Kepala Desa Cima
 AG. Kepala Desa Cima
 AH. Kepala Desa Cima
 AI. Kepala Desa Cima
 AJ. Kepala Desa Cima
 AK. Kepala Desa Cima
 AL. Kepala Desa Cima
 AM. Kepala Desa Cima
 AN. Kepala Desa Cima
 AO. Kepala Desa Cima
 AP. Kepala Desa Cima
 AQ. Kepala Desa Cima
 AR. Kepala Desa Cima
 AS. Kepala Desa Cima
 AT. Kepala Desa Cima
 AU. Kepala Desa Cima
 AV. Kepala Desa Cima
 AW. Kepala Desa Cima
 AX. Kepala Desa Cima
 AY. Kepala Desa Cima
 AZ. Kepala Desa Cima
 BA. Kepala Desa Cima
 BB. Kepala Desa Cima
 BC. Kepala Desa Cima
 BD. Kepala Desa Cima
 BE. Kepala Desa Cima
 BF. Kepala Desa Cima
 BG. Kepala Desa Cima
 BH. Kepala Desa Cima
 BI. Kepala Desa Cima
 BJ. Kepala Desa Cima
 BK. Kepala Desa Cima
 BL. Kepala Desa Cima
 BM. Kepala Desa Cima
 BN. Kepala Desa Cima
 BO. Kepala Desa Cima
 BP. Kepala Desa Cima
 BQ. Kepala Desa Cima
 BR. Kepala Desa Cima
 BS. Kepala Desa Cima
 BT. Kepala Desa Cima
 BU. Kepala Desa Cima
 BV. Kepala Desa Cima
 BW. Kepala Desa Cima
 BX. Kepala Desa Cima
 BY. Kepala Desa Cima
 BZ. Kepala Desa Cima
 CA. Kepala Desa Cima
 CB. Kepala Desa Cima
 CC. Kepala Desa Cima
 CD. Kepala Desa Cima
 CE. Kepala Desa Cima
 CF. Kepala Desa Cima
 CG. Kepala Desa Cima
 CH. Kepala Desa Cima
 CI. Kepala Desa Cima
 CJ. Kepala Desa Cima
 CK. Kepala Desa Cima
 CL. Kepala Desa Cima
 CM. Kepala Desa Cima
 CN. Kepala Desa Cima
 CO. Kepala Desa Cima
 CP. Kepala Desa Cima
 CQ. Kepala Desa Cima
 CR. Kepala Desa Cima
 CS. Kepala Desa Cima
 CT. Kepala Desa Cima
 CU. Kepala Desa Cima
 CV. Kepala Desa Cima
 CW. Kepala Desa Cima
 CX. Kepala Desa Cima
 CY. Kepala Desa Cima
 CZ. Kepala Desa Cima
 DA. Kepala Desa Cima
 DB. Kepala Desa Cima
 DC. Kepala Desa Cima
 DD. Kepala Desa Cima
 DE. Kepala Desa Cima
 DF. Kepala Desa Cima
 DG. Kepala Desa Cima
 DH. Kepala Desa Cima
 DI. Kepala Desa Cima
 DJ. Kepala Desa Cima
 DK. Kepala Desa Cima
 DL. Kepala Desa Cima
 DM. Kepala Desa Cima
 DN. Kepala Desa Cima
 DO. Kepala Desa Cima
 DP. Kepala Desa Cima
 DQ. Kepala Desa Cima
 DR. Kepala Desa Cima
 DS. Kepala Desa Cima
 DT. Kepala Desa Cima
 DU. Kepala Desa Cima
 DV. Kepala Desa Cima
 DW. Kepala Desa Cima
 DX. Kepala Desa Cima
 DY. Kepala Desa Cima
 DZ. Kepala Desa Cima
 EA. Kepala Desa Cima
 EB. Kepala Desa Cima
 EC. Kepala Desa Cima
 ED. Kepala Desa Cima
 EE. Kepala Desa Cima
 EF. Kepala Desa Cima
 EG. Kepala Desa Cima
 EH. Kepala Desa Cima
 EI. Kepala Desa Cima
 EJ. Kepala Desa Cima
 EK. Kepala Desa Cima
 EL. Kepala Desa Cima
 EM. Kepala Desa Cima
 EN. Kepala Desa Cima
 EO. Kepala Desa Cima
 EP. Kepala Desa Cima
 EQ. Kepala Desa Cima
 ER. Kepala Desa Cima
 ES. Kepala Desa Cima
 ET. Kepala Desa Cima
 EU. Kepala Desa Cima
 EV. Kepala Desa Cima
 EW. Kepala Desa Cima
 EX. Kepala Desa Cima
 EY. Kepala Desa Cima
 EZ. Kepala Desa Cima
 FA. Kepala Desa Cima
 FB. Kepala Desa Cima
 FC. Kepala Desa Cima
 FD. Kepala Desa Cima
 FE. Kepala Desa Cima
 FF. Kepala Desa Cima
 FG. Kepala Desa Cima
 FH. Kepala Desa Cima
 FI. Kepala Desa Cima
 FJ. Kepala Desa Cima
 FK. Kepala Desa Cima
 FL. Kepala Desa Cima
 FM. Kepala Desa Cima
 FN. Kepala Desa Cima
 FO. Kepala Desa Cima
 FP. Kepala Desa Cima
 FQ. Kepala Desa Cima
 FR. Kepala Desa Cima
 FS. Kepala Desa Cima
 FT. Kepala Desa Cima
 FU. Kepala Desa Cima
 FV. Kepala Desa Cima
 FW. Kepala Desa Cima
 FX. Kepala Desa Cima
 FY. Kepala Desa Cima
 FZ. Kepala Desa Cima
 GA. Kepala Desa Cima
 GB. Kepala Desa Cima
 GC. Kepala Desa Cima
 GD. Kepala Desa Cima
 GE. Kepala Desa Cima
 GF. Kepala Desa Cima
 GG. Kepala Desa Cima
 GH. Kepala Desa Cima
 GI. Kepala Desa Cima
 GJ. Kepala Desa Cima
 GK. Kepala Desa Cima
 GL. Kepala Desa Cima
 GM. Kepala Desa Cima
 GN. Kepala Desa Cima
 GO. Kepala Desa Cima
 GP. Kepala Desa Cima
 GQ. Kepala Desa Cima
 GR. Kepala Desa Cima
 GS. Kepala Desa Cima
 GT. Kepala Desa Cima
 GU. Kepala Desa Cima
 GV. Kepala Desa Cima
 GW. Kepala Desa Cima
 GX. Kepala Desa Cima
 GY. Kepala Desa Cima
 GZ. Kepala Desa Cima
 HA. Kepala Desa Cima
 HB. Kepala Desa Cima
 HC. Kepala Desa Cima
 HD. Kepala Desa Cima
 HE. Kepala Desa Cima
 HF. Kepala Desa Cima
 HG. Kepala Desa Cima
 HH. Kepala Desa Cima
 HI. Kepala Desa Cima
 HJ. Kepala Desa Cima
 HK. Kepala Desa Cima
 HL. Kepala Desa Cima
 HM. Kepala Desa Cima
 HN. Kepala Desa Cima
 HO. Kepala Desa Cima
 HP. Kepala Desa Cima
 HQ. Kepala Desa Cima
 HR. Kepala Desa Cima
 HS. Kepala Desa Cima
 HT. Kepala Desa Cima
 HU. Kepala Desa Cima
 HV. Kepala Desa Cima
 HW. Kepala Desa Cima
 HX. Kepala Desa Cima
 HY. Kepala Desa Cima
 HZ. Kepala Desa Cima
 IA. Kepala Desa Cima
 IB. Kepala Desa Cima
 IC. Kepala Desa Cima
 ID. Kepala Desa Cima
 IE. Kepala Desa Cima
 IF. Kepala Desa Cima
 IG. Kepala Desa Cima
 IH. Kepala Desa Cima
 II. Kepala Desa Cima
 IJ. Kepala Desa Cima
 IK. Kepala Desa Cima
 IL. Kepala Desa Cima
 IM. Kepala Desa Cima
 IN. Kepala Desa Cima
 IO. Kepala Desa Cima
 IP. Kepala Desa Cima
 IQ. Kepala Desa Cima
 IR. Kepala Desa Cima
 IS. Kepala Desa Cima
 IT. Kepala Desa Cima
 IU. Kepala Desa Cima
 IV. Kepala Desa Cima
 IW. Kepala Desa Cima
 IX. Kepala Desa Cima
 IY. Kepala Desa Cima
 IZ. Kepala Desa Cima
 JA. Kepala Desa Cima
 JB. Kepala Desa Cima
 JC. Kepala Desa Cima
 JD. Kepala Desa Cima
 JE. Kepala Desa Cima
 JF. Kepala Desa Cima
 JG. Kepala Desa Cima
 JH. Kepala Desa Cima
 JI. Kepala Desa Cima
 JJ. Kepala Desa Cima
 JK. Kepala Desa Cima
 JL. Kepala Desa

[illegible]

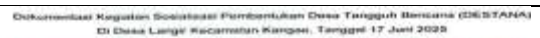
PEMERINTAH KABUPATEN BOKRA
BADAN PEMANGKATAN BERKUALITAS DAERAH
 Jl. Mayor Jie 18 Telp. 085 1360578, email: bapberkab@protonmail@gmail.com
MAJLIS R E

DAFTAR HADIR

Tanggal/Hari: **1** **Rabu, 16 Juni 2021**
 Jam: **09.00 s/d 12.00**

Tempat: **1. Aula Kantor Bap Berkuwalitas, Kecamatan Rangas**
2. Kecamatan Pambakutan Bap, Tanggung (DESTANA)

NO	N. M. A	ISIBATAN	TANDA TANGAN
1.	Pendek Suband, Sun. Bude	Sabur	1.
2.	Pendek Suband, Sun. Bude	Khan H P D	2.
3.	Pendek Suband, Sun. Bude	Amah R D	3.
4.	Pendek Suband, Sun. Bude	Pandani	4.
5.	Pendek Suband, Sun. Bude	Samah	5.
6.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	6.
7.	Pendek Suband, Sun. Bude	Capri N. V. H. H.	7.
8.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	8.
9.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	9.
10.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	10.
11.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	11.
12.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	12.
13.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	13.
14.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	14.
15.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	15.
16.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	16.
17.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	17.
18.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	18.
19.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	19.
20.	Pendek Suband, Sun. Bude	101 R F O D	20.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
Di Desa Gane Kecamatan Magepanda, Tanggal 19 Juni 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI DESA TANGGUH BENCANA
 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
 Di Desa Teka Iku Kecamatan Kange, Tanggal 16 Juni 2025



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
Di Desa Kekawahor Kecamatan Kangas, Tanggal 18 Juni 2025





KEPONTESAN KABUPATEN SIKKA
BAGIAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Mayor No. 18, Tugu Pahlawan, Kota, Kabupaten Sikka
 8451122000

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Sabtu, 30 Juni 2025
 Waktu: 08.00 s.d. selesai
 Tempat: Aula Kantor Desa Magapanda, Kecamatan Magapanda
 Agenda: Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTAB)

No	DAFTAR	CEKRA JANGKAR
1	1. Ketua Panitia	1. Ketua
2	2. Sekretaris	2. Sekretaris
3	3. Bendahara	3. Bendahara
4	4. Tim Kerja	4. Tim Kerja
5	5. Tim Kerja	5. Tim Kerja
6	6. Tim Kerja	6. Tim Kerja
7	7. Tim Kerja	7. Tim Kerja
8	8. Tim Kerja	8. Tim Kerja
9	9. Tim Kerja	9. Tim Kerja
10	10. Tim Kerja	10. Tim Kerja
11	11. Tim Kerja	11. Tim Kerja
12	12. Tim Kerja	12. Tim Kerja
13	13. Tim Kerja	13. Tim Kerja
14	14. Tim Kerja	14. Tim Kerja
15	15. Tim Kerja	15. Tim Kerja
16	16. Tim Kerja	16. Tim Kerja
17	17. Tim Kerja	17. Tim Kerja
18	18. Tim Kerja	18. Tim Kerja
19	19. Tim Kerja	19. Tim Kerja
20	20. Tim Kerja	20. Tim Kerja
21	21. Tim Kerja	21. Tim Kerja
22	22. Tim Kerja	22. Tim Kerja
23	23. Tim Kerja	23. Tim Kerja
24	24. Tim Kerja	24. Tim Kerja
25	25. Tim Kerja	25. Tim Kerja


 Kepala Desa Magapanda


 Kepala Desa Magapanda

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTAB)
 Di Desa Magapanda Kecamatan Magapanda, Tanggal 30 Juni 2025



22281047, Magapanda, Kab. Magapanda
 Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Tim. Indonesia
 Lintang: 8.548886-182603848 122.04902929253876
 Long: 117.54 25 442
 Altitude: 23 meter
 Sat: 10.06.2025
 Nama: B. G. G.





22281047, Magapanda, Kab. Magapanda
 Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Tim. Indonesia
 Lintang: 8.548886-182603848 122.04902929253876
 Long: 117.54 25 442
 Altitude: 23 meter
 Sat: 10.06.2025
 Nama: B. G. G.





22281047, Magapanda, Kab. Magapanda
 Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Tim. Indonesia
 Lintang: 8.548886-182603848 122.04902929253876
 Long: 117.54 25 442
 Altitude: 23 meter
 Sat: 10.06.2025
 Nama: B. G. G.







PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Mawar Nomor 28 Telepon 0851 8385 5768

**JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		KETERANGAN
			PELATIHAN PENCEGAHAN	GLADI KESIAPAN TERHADAP BENCANA	
1.	Waigete	PLTMG	25 orang		Melampirkan dokumentasi kegiatan dan absen peserta
2.	Alok	BPJS	40 Orang		
Dst.					
Jumlah					

Maukere, 31 Desember 2025
Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

JOHANES B.C. PUTU BOTHA, ST
NIP.19741115 200012 1 005

Dokumentasi Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Mawar Nomor 28 Telepon 0851 8385 5768

**JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN
BENCANA
DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH TARGET WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA	KETERANGAN
			Melampirkan dokumen Kebencanaan/Dokumen Kajian Rawan Bencana
1	Paga	17.722 Jiwa	KRB,R3P,SK Tanggap Darurat
2	Mego	14.556 Jiwa	
3	Lela	12.170 Jiwa	
4	Nita	23.689 Jiwa	
5	Alok	33.163 Jiwa	
6	Palue	10.737 Jiwa	
7	Nele	6.442 Jiwa	
8	Talibura	25.555 Jiwa	
9	Waigete	27.757 Jiwa	
10	Kewapante	15.746 Jiwa	
11	Bola	11.148 Jiwa	
12	Magepanda	14.739 Jiwa	
13	Waiblama	9.024 Jiwa	
14	Alok Barat	24.793 Jiwa	
15	Alok Timur	34.788 Jiwa	
16	Koting	6.781 Jiwa	
17	Tanawawo	9.918 Jiwa	
18	Hewokloang	10.016 Jiwa	
19	Kangae	19.688 Jiwa	
20	Doreng	12.615 Jiwa	
21	Mapitara	7.482 Jiwa	

Maumere, 31 Desember 2025
Pit-Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

JOHANES B.C. PUTU BOTHA, ST
NIP.19741115 200012 1 005

DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN SIKKA 2026-2030 Penyusunan dokumen ini didasarkan oleh: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA 2025	2025 RENCANA REHABIILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA KABUPATEN SIKKA
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPERINTAHAN KABUPATEN SIKKA NOMOR: 118/1062/2025 TENTANG: STATUS YANGKAP DARIHAT BENCANA ERUPSI GUNUNG API LEWOTOK LAKI LAKI KABUPATEN FLORES TIMUR YANG BERDAMPAK PADA WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 KABUPATEN SIKKA, Menimbang a. bahwa berdasarkan Riset Penilaian Status Tanggap Darurat Bencana Nomor (RPD) 369/Bal.R/111/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 telah terjadi peningkatan intensitas Erupsi Gunung Api Lewotok Laki-laki Kabupaten Flores Timur yang berdampak pada Wilayah Kabupaten Sikka, perlu dilakukan penanganan dengan segera terhadap warga dan sarana prasarana yang terdampak bencana; b. bahwa untuk melakukan penanganan terhadap bencana yang terjadi, perlu dilakukan upaya penanganan tanggap darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemunculan Puncak, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu menanggapi dampak bencana yang terjadi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Lewotok Laki-laki Kabupaten Flores Timur yang berdampak pada Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia	